

PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KOMODITI/PRODUK/JENIS USAHA (KPJU) UNGGULAN UMKM  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN - TAHUN 2012

*EXECUTIVE SUMMARY*

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan *ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56% dari total PDB di tahun 2010 (Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, 2010). Melihat peran strategis UMKM dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bank Indonesia menyelenggarakan Penelitian Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Di Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan memahami profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian, dan potensi sumberdaya; profil UMKM di Provinsi Sulawesi selatan termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM; Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang terkait dengan pengembangan UMKM; dan Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM; (2) Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di Provinsi Sulawesi selatan, kabupaten/kota dan kecamatan; (3) Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan lintas sektoral di masing-masing kabupaten/kota, misal mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan); (4) Memberikan informasi tentang KPJU potensial; serta (5) Memberikan rekomendasi KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota; Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJU unggulan; dan Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang dikaitkan pula dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi Selatan adalah jagung. Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki sumberdaya alam yang cukup besar bidang pertambangan dan pariwisata. Selain itu Sulawesi Selatan memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan letaknya yang strategis ditengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia.

KPJU unggulan UMKM di Provinsi Sulawesi selatan dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional oleh *multistakeholder* sebagai KPJU UMKM yang secara *eksisting* (saat ini) telah unggul

dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi di masa datang. Tujuan penetapan KPJU unggulan yang paling dominan adalah pertumbuhan ekonomi (0,409), kemudian selanjutnya berturut-turut adalah peningkatan daya saing (0,347) dan penciptaan lapangan kerja (0,244).

Kriteria seleksi yang digunakan dalam penentuan KPJU unggulan dari yang paling penting berturut-turut adalah Teknologi (0,142), Tenaga Kerja Terampil (0,116), Penyerapan Tenaga Kerja (0,113), Sarana Produksi/Usaha (0,100), Manajemen Usaha (0,096), Ketersediaan Pasar (0,091), Sumbangan terhadap Perekonomian (0,85), Modal (0,082), Harga (0,070), Ketersediaan Bahan Baku (0,068), Sosial Budaya (0,036).

## KPJU UNGGULAN KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PENDEKATAN PENANGANANNYA

Di setiap kabupaten/kota yang diteliti, melalui konfirmasi dan analisis lanjutan dengan pendekatan metode MPE, AHP, Borda dan Bayes diperoleh 5 KPJU unggulan lintas sektoral (dan 5 KPJU Potensial lintas sektoral). Lima KPJU Unggulan lintas sektoral tersebut adalah :

- (1). Kabupaten Bantaeng : Padi Mamberamo (skor terbobot 0,037), Rumput laut (0,030), Jagung Hibrida (0,029), Kasur Kapuk (0,029), dan Kakao (0,029).
- (2). Kabupaten Barru : Ikan Bandeng (skor terbobot 0,037), Perdagangan Beras (0,034), Padi Ciliwung (0,034), Padi IR 42 (0,033) dan Padi Cisantana (0,032).
- (3). Kabupaten Bone : Jagung Kuning Bisi 2 (0,049), Kacang Tanah (0,037), Padi Varietas Unggul (0,029), Padi Cigeulis (0,029), Jual Beli Beras (0,025).
- (4). Kabupaten Bulukumba: Ikan Bandeng (Tambak) (0,049), Pete-Pete (Angkutan Kota) (0,042), Padi Ciliwung (0,036) , Padi Ciherang (0,035), Padi Sembada 168 (0,034)
- (5). Kabupaten Enrekang : Bawang Merah (0,046), Cabai Merah (PB/IR) (0,034), Kentang (0,034), Kubis (0,033), dan Jual Beli Hasil Perkebunan (0,030).
- (6). Kabupaten Gowa : Padi Organik (Ipad 2, Ciherang) (0,049), Padi IR 42 (0,043), Padi Ciherang (0,032), Kopi Arabika (0,029), dan Kentang (0,027).
- (7). Kabupaten Jeneponto: Rumput Laut (0,052), Jagung Hibrida (0,042), Padi Memberamo (0,040), Padi Ciliwung (Hibrida) (0,039), dan Jagung Kuning (0,033).
- (8). Kabupaten Kepulauan Selayar : Teripang (0,051), Rumput Laut (0,044), Hotel Melati (0,042), Ikan Kakap (Tangkap) (0,040), dan Wisata Pantai (0,039).
- (9). Kabupaten Luwu : Kopi Arabika (0,059), Cengkeh (0,058), Kakao/Coklat (0,053), Kopi Robusta (0,048), dan Padi Ciliwung (0,046).
- (10). Kabupaten Luwu Timur : Padi Ciherang (0,044), Padi Ciliwung (0,043), Rumput Laut (0,036), Meubel (0,036), dan Kelapa Sawit (0,033).
- (11). Kabupaten Luwu Utara : Kakao (0,046), Kelapa Sawit (0,036), Sagu (0,036), Padi Tarone (Lokal) (0,032), dan Durian (0,031).
- (12). Kabupaten Maros : Padi Cisantana (0,051), Industri Penggilingan Padi (0,039), Padi Ciliwung (0,035), Padi Ciherang (0,035), dan Toko Bahan Bangunan (0,031).

- (13). Kabupaten Pangkep : Ikan Bandeng (0,045), Udang Windu (0,042), Padi Ciliwung (0,037), Marmer (0,036), dan Padi Cisantana (0,036).
- (14). Kabupaten Pinrang : Udang Windu (0,047), Padi Inpari 13 (0,043), Ikan Bandeng (0,039), Beras (0,035), dan Jagung Hibrida (0,034).
- (15). Kabupaten Sidrap : Padi Mekonga (0,060), Jagung Hibrida (Bisi, Bisi2) (0,056), Padi Inpari 13 (0,050), Penggilingan Padi (0,042), dan Padi Inpari 7 Lanrang (0,039).
- (16). Kabupaten Sinjai : Udang (Budidaya) (0,030), Ikan Bandeng (Budidaya) (0,029), Cengkeh (0,029), Jagung Hibrida (0,028), dan Sapi Lokal (0,028). Hasil FGD memberikan formasi tambahan KPJU Unggulan : Ikan Cakalang (Tangkap), Sapi Lokal, Padi Ciherang, Durian, Kakao.
- (17). Kabupaten Soppeng : Padi Inpari 7 (0,088), Padi Cigaulis (0,071), Kakao (0,048), Jagung Kuning (0,042), dan Ayam Ras (Petelur) (0,038).
- (18). Kabupaten Takalar : Jagung Hibrida (Bisi, Bisi2) (0,044), Tebu (0,039), Cabai Merah Besar (0,032), Cabai Rawit (0,030), dan Semangka (0,029).
- (19). Kabupaten Tana Toraja : Wisma (0,036), Penjahit Pakaian (0,035), Jual Beli Kopi (0,033), Rumah Makan (0,031), dan Bus Antar Kota (0,031).
- (20). Kabupaten Toraja Utara : Wisata Rumah Adat (0,038), Padi Lokal Merah (Pare Barrik) (0,037), Kopi Arabika (0,037), Padi Lokal Hitam (Pare Bau) (0,037), dan Padi Pare Ambo (0,035).
- (21). Kabupaten Wajo : Padi Ciliwung (0,034), Penggilingan Padi (0,033), Padi IR 66 (0,032), Cengkeh (0,027), dan Wisata Rumah Adat (0,026)
- (22). Kota Makassar : Restoran Seafood (0,047), Rumah Makan Sea Food (0,044), Angkutan Kota (Pete-Pete) (0,041), Mini Market (0,040), dan Toserba (0,040).
- (23). Kota Palopo : Kakao (0,065), Cengkeh (0,043), Durian montong (0,036), Sapi Bali (0,033), dan Durian (lokal) (0,032).
- (24). Kota Parepare: Hotel Melati (0,066), Perdagangan Meubel (0,064), Restoran (0,059), Bengkel Motor (0,043), dan Percetakan (0,041).

Selain itu, terdapat 10 KPJU Unggulan di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dihasilkan dari penilaian kembali terhadap KPJU Unggulan di tingkat Kota/Kabupaten dengan metode Borda dan metode Bayes adalah Padi Ciliwung (0,050), Kakao/Cokelat (0,046), Jagung Hibrida (0,040), Meubel (0,033), Ikan Bandeng (0,031), Penggilingan Padi (0,030), Beras (0,028), Udang (windu, cani, api-api, putih, vaname) (0,026) , Sapi Pedaging (bali, brahma, ongol, spesies lokal) (0,026) dan Toko Bahan Bangunan/Material (0,026). Hasil FGD memberikan formasi tambahan KPJU Unggulan Rumput Laut yang memang mendapat nilai bobot di peringkat ke-11.

Penanganan dan pengembangan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di 24 Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi yang diteliti perlu menggunakan titik kekuatan (yang selanjutnya dikembangkan menjadi *competitive advantages* dan nilai jual) dan mengeliminasi titik kritisnya (kelemahan), serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

- a. Peluang yang dimaksud secara umum adalah positioning eksisting Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan sebagai daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Pada beberapa daerah, peluang tersebut diwujudkan dalam visi/misi dan kebijakan daerah.
- b. Titik kekuatan yang dimaksud secara umum adalah KPJU yang terpilih umumnya memang KPJU yang sudah unggul di sektornya, baik dalam aspek kapasitas produksinya, luas lahan, serapan tenaga kerja dan kontribusinya bagi perekonomian daerah.
- c. Titik kritis yang dimaksud secara umum adalah lebih kepada persoalan biaya produksi/proses yang masih tinggi, tingkat produktivitas yang belum optimal, teknologi pengembangan yang belum ada/minim, teknologi pasca panen untuk peningkatan nilai tambah, dan perluasan akses pasar.

## REKOMENDASI

### 1. Rekomendasi Penetapan KPJU Unggulan dan Potensial

- a. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diteliti untuk menetapkan 5 KPJU Unggulan dan Potensial hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) sebagai KPJU Unggulan dan Potensial daerah.
- b. Direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan untuk menetapkan 10 KPJU Unggulan hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) sebagai KPJU Unggulan Provinsi.

### 2. Rekomendasi Peran Strategis

Direkomendasikan pembagian peran strategis yang dapat dilakukan antara pemerintah, pelaku/asosiasi pengusaha UMKM, perbankan, dan *stakeholder* lain dalam pengembangan UMKM dan KPJU unggulannya sebagai berikut.

#### a. Pemerintah.

Peran pemerintah kini dan masa mendatang dalam pembangunan UMKM adalah sebagai regulator, fasilitator, dan stimulator, yang menekankan upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan UMKM basis KPJU Unggulan.

#### b. Pelaku/Asosiasi Pengusaha UMKM.

- (1) Identifikasi akar masalah atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pengembangan usaha mereka, serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu, seperti: penyedia BDS (*Business Development Service*), asosiasi UKM, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak strategis lain.

- (2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui upaya pengembangan jiwa kewirausahaan, pengembangan etos kerja, dan disiplin kerja serta peningkatan komitmen moral yang tinggi.
- (3) Melaksanakan secara seksama, konsisten dan berkesinambungan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk pengembangan usahanya.
- (4) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan.
- (5) Aktif dalam berbagai forum pengembangan usaha sebagai wahana untuk pengembangan penyampaian aspirasi dan kebutuhannya untuk pengembangan usaha serta memperluas jaringan usaha.
- (6) Mengaktifkan Kadin sebagai forum strategis bagi penyaluran aspirasi, fasilitasi, forum informasi dan komunikasi dan sinergisitas antar UMKM dan dengan organisasi bisnis lainnya di dalam dan luar negeri dalam pengembangan usahanya.

#### **c. Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan LSM**

- (1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan UMKM dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.
- (2) Mengembangkan teknologi tepat guna dan paket teknologi dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, serta daya saing UMKM.
- (3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi, pemanfaatan teknologi, informasi serta pelatihan untuk mengembangkan kompetensi SDM UMKM, sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.
- (4) Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, pengembangan SDM UMKM, serta model-model pengembangan alternatif untuk UMKM.
- (5) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, Dekopinda, Asosiasi UKM/KADIN.
- (6) Melaksanakan advokasi kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, dan pemberian dukungan perkuatan bagi UMKM.

#### **d. Perbankan**

- (1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan pembiayaan UMKM dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.

- (2) Mengembangkan paket pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan usaha UMKM, termasuk pengembangan pola dan model pembiayaan alternatif berbasis syariah. Pembiayaan basis syariah sangat relevan dengan visi dan misi pembangunan di banyak kabupaten/kota tersebut.
- (3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi dan pelatihan pemanfaatan pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usahanya secara berkesinambungan
- (4) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan pembiayaan UMKM dengan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, asosiasi Pengusaha UMKM dan lembaga swadaya masyarakat.

**b. Rekomendasi Khusus Pengembangan KPJU Unggulan**

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis setiap KPJU unggulan, telah direkomendasikan dalam FGD dan *Indepth Interview* sejumlah rencana aksi, baik strategis (jangka panjang dan menengah) maupun taktis (jangka pendek), kepada pelaku UMKM, Instansi Pemerintah Terkait, dan Perbankan (terlampir).